



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SUDARYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3. NHK : **711336**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 365.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 921 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1267 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 65.000.000

1. MOBIL, ISUZU ISUZU PANTHER PIK UP Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2004, LAINNYA Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.156.469**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 434.156.469

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 434.156.469

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.